

HARGA TEMBAKAU MASIH RENDAH

Petani, Pedagang dan Produsen Saling Tahan Diri

TEMANGGUNG (KR) - Bupati Temanggung dan tim gugus pertembakauan pantau penjualan tembakau di perwakilan pabrik rokok PT Djarum yang ada di daerah tersebut.

Hasilnya, petani, pedagang dan pabrik rokok saling menahan diri untuk mendapatkan target keuntungan diinginkan. PT Djarum mencari tembakau sesuai kualitas yang diinginkan dan menahan duitnya, sedangkan petani dan pedagang menahan tembakau karena harga belum ketemu.

"Mereka saling menahan diri, Djarum menahan duitnya, petani dan pedagang menahan barangnya karena harga belum ketemu," kata Bupati Temanggung Al Khadziq, Selasa (31/8).

Dia mengatakan PT Djarum masih terlalu selektif dalam memilih kualitas barang. Sedangkan kualitas yang dicari itu masih sulit untuk dipenuhi oleh para petani. Maka itu pada pihak Djarum supaya harganya dinaikkan lagi agar ketemu dengan harapan petani.

"Sementara saya juga meminta pada petani meningkatkan kualitas barangnya lebih baik lagi agar spesifikasinya bisa masuk pabrik. Kalau



Bupati Temanggung Al Khadziq mengunjungi perwakilan pabrik rokok PT Djarum di Temanggung.

dari pabrik menaikkan harga dan petani menaikkan kualitas saya rasa ini akan segera ketemu keinginan para petani dan keinginan pabrik sehingga bisnis bisa merjalan," katanya.

Dia mengemukakan berdasarkan pantauan di beberapa gudang perwakilan pabrik rokok di Kabupaten Temanggung hingga sekarang pembelian tembakau khususnya perwakilan PT Djarum masih lesu.

Lesunya pembelian tembakau, kata dia karena harga yang diberikan

pabrik rokok tersebut masih jauh dari yang diharapkan para petani.

Menurutnya kalau keadaan ini terus terjadi, yakni pabrik dan petani saling menahan diri maka bisnis tidak akan berjalan. Kalau tidak jalan maka nanti kedua pihak akan dirugikan.

Khadziq menyampaikan secara umum perdagangan tembakau di Temanggung mulai berangsur membaik, harga juga mulai membaik, meskipun masih dirasa kurang oleh para petani dan pedagang tembakau. **(Osy)-f**

Kemendes PDTT Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA (KR) - Ditengah pandemi Covid-19 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bupati dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim secara virtual, Selasa (31/8). Rakor tersebut secara spesifik membahas pengentasan kemiskinan di 35 kabupaten yang dicanangkan sebagai *pilot project* kemiskinan ekstrem.

Halim Iskandar dalam paparannya mengatakan, Rakor saat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet. Dalam Ratas Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan ekstrem tahun 2024.

"Pertemuan kita singkat saja, yaitu terkait dengan rencana atau garis kebijakan Pak Presiden awal Januari 2021 dalam rapat terbatas terkait dengan permasalahan

kemiskinan di Indonesia, Presiden pada waktu itu memberikan arahan agar kemiskinan ekstrem Indonesia tahun 2024 itu menjadi 0 persen," ujar Halim Iskandar.

Tindak lanjut dari Ratas itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Ma'ruf Amin menentukan pilot project dilaksanakan di tujuh provinsi dan 35 Kabupaten. Diharapkan pada akhir 2021 dan awal 2022, bisa diwujudkan zero kemiskinan ekstrem di wilayah pilot project. Keberhasilan di wilayah pilot project akan dilanjutkan ke 250 kabupaten berikutnya di tahun 2022 hingga 2024.

Oleh karena itu, ujar Halim, setidaknya sudah memiliki lima strategi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di kabupaten-kabupaten yang dijadikan sebagai pilot project, yakni mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan, pembangunan kewilayahan, pendampingan desa dan kelembagaan. **(Ati)-f**

DIDUGA LAKUKAN PENIPUAN ARISAN ONLINE

Seorang Warga Mertoyudan Diamankan

MAGELANG (KR) - Diduga melakukan tindak pidana penipuan, R (29) warga yang tinggal di wilayah Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, diamankan tim Sat Reskrim Polres Magelang di rumahnya. Petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya rekening koran milik R dan milik korban, pakaian yang dibeli R maupun lainnya.

Kapolres Magelang AKBP M Sajarod Zakun SH SIK kepada wartawan di Polres Magelang, Selasa (31/8), mengatakan keberhasilan pengungkapan perkara ini berangkat dari informasi masyarakat. Kegiatan ini, lanjutnya, dengan mengadakan berbagai macam model bentuk arisan lewat media sosial. Sekarang R sudah ditahan di Polres Magelang.

Didampingi Waka Polres Magelang Kompol Aron Sebastian SIK MSI, Kasat Reskrim Polres Magelang AKP M Alfian Armin, Kasi Humas Polres Magelang Iptu Abdul Mothohir SH maupun lainnya, Kapolres Magelang menambahkan 1 hand-

phone (HP) milik R juga ikut diamankan sebagai barang bukti. Berdasar keterangan yang ada, nilai kerugian sekitar Rp 300 juta dari 55 member atau peserta arisan online.

Dalam kesempatan ini Kapolres Magelang juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada berkaitan dengan modus-modus seperti ini, khususnya arisan online lewat medsos, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan penipuan maupun penggelapan.

Kasat Reskrim Polres Magelang menambahkan modus operandi kasus ini tersangkan mengadakan arisan menurun, oper slot, investasi, dan duos, dengan nama Arisan Menurun by Echy, kemudian menawarkan kepada orang lain dengan menggunakan identitas-identitas yang diduga fiktif sebagai peserta yang sudah terdaftar untuk meyakinkan dan menarik minat calon member atau peserta, serta menjanjikan keuntungan fantastis. **(Tha)-d**

Alih Status

Kedua pasal tersebut adalah pasal 69B ayat (1) yaitu "Pada saat UU ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak UU ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pasal 69C yang berbunyi "Pada saat UU ini mulai berlaku, Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat men-

Sambungan hal 1

di pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Yusuf Sahide berharap agar majelis MK mengubah kedua pasal tersebut menjadi "Pada saat UU ini mulai berlaku, Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhhitung sejak UU ini mulai berlaku diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-un-

dangan".

Alasan pemohon adalah karena frasa "dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam pasal 69B dan 69C dimanfaatkan secara salah karena menggunakan TWK sebagai seleksi dan bagi pegawai yang tidak lolos TWK akan mengakibatkan pemberhentian pegawai KPK, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

(Ant)-d

Kian

diizinkan uji coba operasional dengan ketentuan kapasitas 50 persen dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta pengunjung yang diperbolehkan masuk harus berusia 12 tahun hingga 70 tahun.

"Berarti hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang masuk ke mal karena tidak bisa tunda. Bahkan makan di restoran yang ada di mal tetap tidak bisa dine in harus take away," imbuhnya.

Terkait RT yang masih berstatus zona merah di DIY, Baskara Aji mengaku su-

Sambungan hal 1

dah hampir habis karena mayoritas sudah masuk zona hijau. Menurutnya perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di DIY sudah membuahkan hasil termasuk penambahan kasus terkonfirmasi di DIY mengalami penurunan signifikan dan rumah sakit semakin kosong karena kesembuhan banyak dalam beberapa hari ini.

"Kita masih tetap menerapkan aturan sesuai level 4 meskipun kasus Covid-19 telah menunjukkan penurunan. Tak terkecuali, pembelajaran tatap muka (PTM) belum diizinkan, tetapi yang sudah di-

izinkan baru guru-guru maksimal 25 persen dari jumlah guru atau tenaga pendidik bisa beraktivitas di sekolah menyiapkan PTM tersebut," jelasnya.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Ditya Nanaryo Aji melaporkan penambahan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY mencapai 539 kasus sehingga total 149.918 kasus pada Selasa (31/8). Rerata kasus positif harian mencapai 10,46 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 12.293 kasus. **(Ria/Ira)-d**

Sanksi

Wakil Ketua KPK ini dinilai Dewas KPK terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2 huruf b) dan Pasal 4 ayat (2 huruf a) Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) KPK RI No 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Ketentuan Perdewas, dijatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji 40% selama 12 bulan.

Karenanya, kini publik menaruh perhatian atas sanksi yang ringan ini. Sebab tidak sebanding dengan tingkat bahayanya bagi upaya pemberantasan korupsi dan kewibawaan KPK di mata publik.

Sanksi ini pelanggaran kode etik ini sangat ringan, karena hanya pemotongan gaji pokok. Padahal gaji pokok wakil ketua KPK hanya berkisar Rp 4,6 juta sementara untuk THP (*take home pay*) sekitar Rp 100-an juta perbulan. Itulah sebab, sebenarnya potongan gaji pokok sebagai sanksi pelanggaran etik tidak akan banyak berpengaruh dan mungkin juga tidak membawa efek jera bagi pelaku.

Jika ditelisik lebih dalam sebenarnya sesuai ketentuan Pasal 36 UU No.30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dinyatakan, Pimpinan KPK dilarang: mengadakan hubungan langsung atau ti-

dak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun. Tindakan ini merupakan pelanggaran pidana bukan sekadar pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 65 UU No 30 Tahun 2002 jo UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menegaskan bahwa setiap Anggota KPK yang melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Maka pemberian sanksi etik yang ringan ini akan dapat berimplikasi pada tak serius dalam menjaga marwah KPK, antara lain: Pertama, akan semakin menurunkan wibawa KPK di mata publik dan juga pelaku korupsi. Karena para koruptor akan berpotensi mengintervensi KPK. Bahkan KPK dapat dan mudah dipengaruhi pihak luar.

Kedua, putusan sanksi ringan ini akan berpotensi pada lingkungan internal birokrasi di KPK yang tak cukup kuat menjamin dan menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap pelanggaran di internal KPK. Ketiga, Putusan sanksi ringan ini menunjukkan sikap permisif dan toleran di internal KPK. Pelanggaran etik hanya

Sambungan hal 1

diberi sanksi ringan dan Dewas KPK tak berani melakukan kontrol ketat terhadap pelanggaran kode etik.

Keempat, sanksi ringan pada pimpinan KPK ini akan berdampak pada ketidakadilan dalam pemberian sanksi di internal KPK. Selama ini sanksi yang diberikan kepada penyidik KPK yang melanggar kode etik adalah mengundurkan diri. Sebagaimana pernah terjadi pada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju sanksinya diminta untuk mengajukan pengunduran diri. Pengaturan pengunduran diri diatur dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Pengawas KPK (Perdewas) No 2 Tahun 2020.

Seharusnya ketentuan ini juga berlaku bagi siapapun di tubuh KPK yang melanggar kode etik. Bertemu langsung dengan pihak yang berperkara adalah pelanggaran kode etik. Sanksinya diminta mengundurkan diri. Bukankah Perdewas KPK berlaku untuk semua unsur birokrasi di tubuh KPK, baik penyidik, karyawan atau pimpinan KPK?

(Penulis adalah Pengajar Pascasarjana Ilmu Hukum dan Direktur LKBH FH Universitas Sebelas Maret)-d

KPK

Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto, Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO).

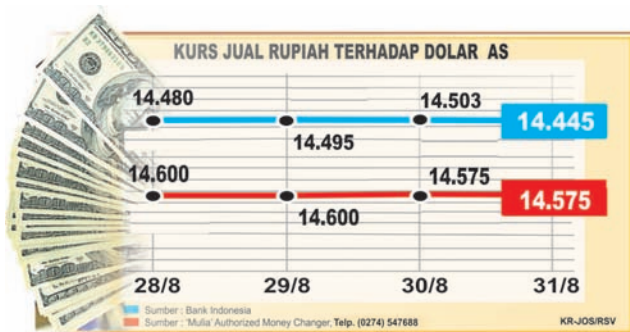
Selanjutnya, Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD). Disebutkan, tarif untuk menjadi pejabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektare.

Alex mengimbau kepada para tersangka lain untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan KPK. Ia juga menyebutkan, dari 22 tersangka, sementara yang ditahan baru lima. "Yang lain ke mana? Mungkin masih di rumahnya karena pada saat kami melakukan OTT, kami tidak menangkap secara keseluruhan 22 orang itu, tetapi kami menangkap terhadap orang-

Sambungan hal 1

perangkat yang secara langsung dapat diakses masyarakat.

"Kami masih belum sempurna karena ketika kami di Paniradya Kaistimewan, salah satu yang terus kami upayakan terkait penyebaran informasi keistimewaan agar tersampaikan ke masyarakat. Mengingat masih ada banyak masukan dari masyarakat terkait dengan keistimewaan DIY sampai saat ini" paparnya. **(Ria/Ira)-d**



Prakiraan Cuaca					Rabu, 1 September 2021	
Lokasi	Cuaca				Suhu °C	Kelembaban
	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari		
Bantul					23-30	65-95
Sieman					23-30	65-95
Wates					24-30	60-95
Wonosari					23-30	65-95
Yogyakarta					23-30	65-90
 Cerah		Berawan		Udara Kabur	 Hujan Lokal	 Hujan Petir
Grafs : Arkio						

Grafis : Arko

Maksimalkan Cuan dengan Passive Income Part 1



Alfriadi Dwi Atmoko, SE MSi Ak CA
Dosen Prodi Akuntansi
Universitas Amikom Yogyakarta

HALO pembaca yang kreatif, kali ini saya akan membahas tak jarang dari kita yang bagaimana memaksimalkan cuan dengan pas-

sive income. Namun sebelum saya bahas bagaimana cara mendapatkan-nya, kita perlu mengenal terlebih dahulu istilah tersebut. Pertama, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah "Cuan" nah apasih sebenarnya cuan itu? Cuan adalah bahasa yang berasal dari Bahasa Hokkian, China bagian selatan yang diserap oleh kaum milenial menjadi bahasa pergaulan. Kata cuan sering kali kita lihat pada sosial media maupun kita denar pada kehidupan sehari-hari. Meski begitu cuan adalah bahasa yang masih bingung apa arti kata cuan tersebut. Yaa, cuan

berarti uang atau bisa disebut juga keuntungan. Kedua, passive income juga merupakan bahasa yang sering juga kita dengar namun tak banyak juga yang dapat mengartikan hal tersebut. Passive income berarti anda tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang, namun uanglah yang bekerja untuk anda. Yaa, passive income merupakan dambaan banyak kalangan karena tidak perlu bekerja secara substansial namun telah menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras. Namun pada awal kita mendapatkan passive

income, kita perlu bekerja keras terlebih dahulu untuk menabung dan mengumpulkan uang lebih banyak bahkan perlu banyak melakukan research agar kita tidak mengalami kerugian.

Nah setelah mengetahui arti kata cuan dan passive income, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan cuan dengan passive income? Terdapat berbagai cara untuk mendapatkan cuan dengan passive income. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua cara untuk mendapatkannya, diantaranya adalah membeli saham dan obligasi.

Pertama, jika kita memilih dengan cara membeli saham untuk mendapatkan cuan maka kita harus melakukan penelitian pada berbagai perusahaan dan memutuskan berapa banyak saham perusahaan yang akan kita beli nantinya. Perlu ketelitian dalam memutuskan seberapa banyak kita akan membeli saham perusahaan tersebut, dikarenakan pergerakan harga saham sangat cepat. Cuan yang kita dapatkan dari membeli saham adalah deviden. Namun tidak semua perusahaan akan membagikan keuntungannya dalam bentuk deviden, maka perlu ke-

telitian dan berbagai analisis untuk memutuskan membeli saham perusahaan tersebut. Cuan yang kedua berasal dari harga jual saham. Jika terdapat kenaikan harga wajar saham dan kita memutuskan untuk menjualnya maka kita mendapatkan cuan, dan kita mendapatkan cuan dari deviden dan selisih harga jual.

Kedua passive income berasal dari investasi obligasi. Cara kedua ini berarti kita membeli obligasi kepada perusahaan penerbit. Cuan yang akan kita dapat adalah pembayaran bunga setiap periodenya karena

obligasi ini adalah berjangka panjang maka sepanjang periode tersebut kita akan mendapatkan cuan. Jika periodenya telah berakhir maka yang kita dapat adalah pengembalian pokok yang telah kita investasikan kepada perusahaan tersebut. Namun kita perlu mempertimbangkan reputasi perusahaan tersebut agar pembayaran bunga obligasi tidak terlambat. Nah demikian dua cara mendapatkan cuan dengan passive income. Cara lain akan saya bahas di tulisan saya selanjutnya. ***